

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ABSTRAK

Melia Putri Tanisha (223309010063)

Theresia Titania Lai (223309010031)

Di Indonesia, penggunaan media sosial telah berkembang pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk penegakan hukum di era Revolusi Industri Keempat. Tujuan dari kajian ilmiah ini ialah untuk mengetahui bagaimana media sosial dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia serta apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah memadai untuk menangani masalah ini. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui kajian terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya, keadilan belum ditegakkan secara merata, akses terhadap kekuasaan politik dan jurnalisisme masih dibatasi, serta otoritas penegak hukum yang belum cukup responsif. Meskipun media sosial meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penegakan hukum, pepatah “*No viral, no justice*” berpotensi mengancam imparialitas penegakan hukum. Dari sudut pandang hukum sendiri, Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan yang mengatur mengenai penggunaan media sosial. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum masih perlu meningkatkan efektivitas dan aksesibilitasnya, serta bahwa undang-undang yang berlaku perlu diperbarui agar lebih mencerminkan kemajuan teknologi terbaru. Dengan demikian, penegakan hukum dapat ditindak dengan lebih cepat, adil, dan efisien.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Media Sosial, Opini Publik, Revolusi Industri 4.0.

ABSTRACT

In Indonesia, the use of social media has grown rapidly and influenced various aspects of daily life, including law enforcement in the era of the Fourth Industrial Revolution. The purpose of this study is to determine how social media can affect the effectiveness of law enforcement in Indonesia and whether current legislation is adequate to address this issue. The methodology of this study is a normative legal study using a descriptive approach through an analysis of relevant laws and regulations. The research findings indicate that law enforcement in Indonesia still faces several challenges. For instance, justice is not yet upheld equitably, access to political power and journalism remains restricted, and law enforcement authorities are not sufficiently responsive. Although social media enhances transparency and participation in law enforcement, the adage “No viral, no justice” has the potential to threaten the impartiality of law enforcement. From a legal perspective, Indonesia has established a number of regulations governing the use of social media. The conclusions of this study indicate that law enforcement agencies still need to improve their effectiveness and accessibility, and that existing laws need to be updated to better reflect the latest technological advancements. Thus, law enforcement can be carried out more swiftly, fairly, and efficiently.

Keywords: Law Enforcement, Social Media, Public Opinion, Fourth Industrial Revolution